

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA TAMANSARI KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS

Chamid Sutikno¹

¹Program Studi Administrasi Publik, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia

*c.sutikno@unupurwokerto.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskripsikan terkait dengan pelaksanaan implementasi kebijakan pada Program Keluarga Harapan di Desa Tamansari Kecamatan karanglewas Kabupaten Banyumas sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program keluarga harapan berfokus pada peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga, pendidikan dan kesehatan agar masyarakat secara bertahap berdaya secara ekonomi. Metode Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti menggambarkan suatu masalah dalam penelitian yang dilakukan berdasarkan jawaban dari masalah tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan proses Implementasi kebijakan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada berbagai aspek yang dilakukan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh para aktor program baik pendamping, koordinator maupun kelompok masyarakat Aspek *Target group* dalam implementasi kebijakan secara bertahap mulai membangun dan membentuk kesadaran dengan bantuan koordinator Program dan pendampingan kelompok kerja serta kelompok masyarakat penerima manfaat. *Implementing organization*, yaitu pihak-pihak yang tergabung dalam implementasi kebijakan program keluarga harapan baik dari unsur pemerintah daerah, penamping PKH, kelompok masyarakat dan pihak swasta dapat terjalin komunikasi dan sinergisitas agar implemntasi dari kebijakan program keluarga harapan dapat berjalan sesuai aturan dan prosedurnya. *Environmental factors* pemahaman terhadap lingkungan sosial dan kondisi ekonomi masyarakat menjadi factor penentu dalam implmentasi program keluarga harapan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kesejahteraan Masyarakat, Program Keluarga Harapan.

Abstract

This research is of implementation the family hope in Tamansari village Banyumas Regecy. The goal of the Family Hope program is to minimize financing for community needs, reduce poverty rates gradually, increase economic development in creating prosperity and develop the use of assistance in all fields. The family of hope program focuses on increasing family economic empowerment, education and health so that the community is gradually empowered economically. This research method uses a descriptive method with a qualitative approach, where the researcher describes a problem in research conducted based on the answer to the problem. The data collection techniques used in this study are: interviews, observation and documentation. The results of research carried out by the process of policy implementation in the implementation of the Family Hope Program in various aspects carried out have not been fully implemented by program actors, both assistants, coordinators and community groups. Implementing organization, namely the parties involved in the implementation of the family hope program policy both from elements of the local government, community groups and the private sector can establish communication and synergy so that the implementation of the family hope program policy can run according to the rules and procedures. Environmental factors understanding of the social environment and the economic conditions of society is a determining factor in implementation of the family of hope program.

Keywords: Implementation Policy, Sosial Welfare, Family Hope Program

PENDAHULUAN

Proses pelaksanaan suatu kebijakan yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap suatu masalah diperlukan langkah seperti perumusan, pengidentifikasian sampai dengan implementasi kebijakan (Theoria Stifelsen. 2017). Tahapan implementasi menjadi salah satu tahapan yang penting dalam menjalankan implementasi kebijakan terhadap suatu masalah yang dihadapi dalam ruang publik (Agustino, Leo. 2017). Dalam implementasi kebijakan terletak pada pemegang kekuasaan secara struktural dan para pihak yang terlibat dalam mengambil suatu keputusan yang mempunyai tujuan bersama (Andersson Annika Lantz et.al. 2015). Keputusan yang diambil dari para pihak menjadikan sebagai salah satu langkah strategi dan arahan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Penerapan aturan yang direncanakan memiliki tujuan dan tanggungjawab dalam menjalankan kebijakan yang bersifat publik (Arizzo. 2017). Pelaksanaan aturan ini menjadi salah satu sumber pedoman dalam melaksanakan implementasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan seperti pemerintah dan *stakeholders* yang memiliki jejaring dalam mewujudkan tujuan bersama sehingga dengan adanya implementasi kebijakan menjadi salah satu langkah dalam menentukan dan mengetahui seberapa pengaruhnya kebijakan yang diterapkan dalam masyarakat (Asna Aneta. 2016).

Rencana strategi implementasi kebijakan menjadi upaya dalam melihat kondisi dan situasi yang terjadi dalam lingkungan masyarakat (Babatunde, Binoyo. 2019). Upaya ini dilakukan yang ditujukan kepada kelompok dari sasaran kebijakan untuk menghindari berbagai kemungkinan dampak yang terjadi dalam melaksanakan suatu kebijakan untuk mewujudkan suatu tujuan (Stewart Jenny. 2018). Tahap implementasi ini secara khusus menjadi salah satu strategi dalam menjalankan suatu kebijakan dari organisasi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan yang lebih efektif dari proses sebelumnya (Kusumanegara Solahuddin, 2010). Pelaksanaan kebijakan atau implementasi harus memiliki strategi manajemen dalam proses pelaksanaan program, konten dan konteks yang jelas dalam implementasi, serta prosedur yang akan dilaksanakan untuk menghindari kegagalan dari implementasi kebijakan itu sendiri (Kwong, Yan Wai. 2019). Salah satu implementasi kebijakan yaitu terkait dengan permasalahan sosial, khususnya implementasi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan yang terus berkembang di lingkungan masyarakat (Umar dan Zulkarnain. 2018).

Permasalahan mengenai kemiskinan yang ada di Indonesia yaitu suatu bentuk permasalahan dalam bidang sosial yang menjadi permasalahan yang tidak bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut secara efektif dan efisien (Kwong, Yan Wai. 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah kemiskinan bukanlah suatu permasalahan yang mudah untuk diatasi namun dapat dikategorisasikan ke dalam suatu permasalahan yang sulit untuk diatasi secara cepat (Sahi, Nirmala Afrinti, Taufiqurokhman, And Andriansyah. 2019). Pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya sudah melakukan banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan masalah kemiskinan yang terjadi di masyarakat, namun sampai sekarang masalah kemiskinan masih banyak dijumpai di berbagai daerah. Kebijakan yang ada belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Berikut disajikan tabel jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2018 – 2020.

Tabel. 1 Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2018 - 2020

Bulan dan Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)	% Jumlah Penduduk
Maret (2018)	25,95	9,82
Maret (2019)	25,14	9,41
Maret (2020)	26,42	9,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, sampai saat ini jumlah penduduk yang mengalami kemiskinan di Indonesia yang terjadi di Maret 2018 mencapai 25,95 juta orang atau 9,82 persen. Sedangkan pada Maret 2019 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yaitu menjadi

sebesar 25,14 juta jiwa atau 9,41 persen. Dan pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 26,42 juta jiwa atau 9,78 persen (Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2019). Kemiskinan juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Banyumas yang mendapat julukan sebagai Kota Satria, dijuluki sebagai Kota Satria karena kota ini memiliki banyak pahlawan nasional. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan tabel mengenai keadaan kemiskinan di Kabupaten Banyumas sejak tahun 2018 – 2020, berdasarkan garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin.

Tabel. 2 Garis kemiskinan, jumlah, dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Banyumas tahun 2018 – 2020

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2018	366 442	226,20	13,50
2019	385 140	211,60	12,53
2020	406 250	225,80	13,26

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2021

Berdasarkan data tabel di atas menunjukkan bahwa, kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 yaitu sebesar 226,20 ribu atau 13,50 persen. Dan pada tahun 2019 mengalami penurunan sehingga jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 211,60 ribu atau 12,53 persen. Akan tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu dengan jumlah penduduk miskin sebesar 225,80 ribu atau 13,26 persen (Banyumas, 2021). Jumlah kemiskinan pada tahun 2020 di Kabupaten Banyumas termasuk dalam peringkat kedua jumlah kemiskinan terbanyak setelah Kabupaten Brebes. Kenaikan jumlah kemiskinan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 diantara lain disebabkan oleh faktor adanya pandemi Covid- 19 di mana banyak warga masyarakat di Kabupaten Banyumas yang terkena PHK dikarenakan perusahaan yang menjadi tempat bekerja tidak dapat beroperasi secara maksimal bahkan ada yang menutup perusahaannya untuk sementara waktu. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 adalah sebesar 225,80 (ribu) atau sekitar 13,26 %. Sedangkan Kabupaten Brebes adalah sebesar 308,78 (ribu) atau sekitar 17,03% (Musa, Umar Farouk. 2019).

Kecamatan Karanglewas merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Banyumas yang memiliki tingkat kemiskinan yang bisa dibilang cukup tinggi dan menjadi salah satu kecamatan di kabupaten banyumas yang paling banyak menerima manfaat dari program keluarga harapan (PKH). Pada tahun 2021 jumlah keluarga miskin di Kecamatan Karanglewas yang mendapatkan program keluarga harapan (PKH) sebesar 4797 penerima manfaat (Sumber: SP2d PKH, 2021). Sampai saat ini salah satu desa yang memiliki tingkat kemiskinan dan penerima manfaat dari program PKH adalah Desa Tamansari. Desa Tamansari termasuk salah satu desa yang sebagian besar penduduknya menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu mencapai jumlah 542 KPM di tahun 2022. Sejak adanya program PKH mulai diimplementasikan di Desa Tamansari sejak tahun 2013-2018, angka kemiskinan yang ada di desa tersebut tergolong masih lumayan tinggi, dikarenakan program PKH yang ada belum dapat berjalan secara optimal dan belum berdampak secara positif bagi keadaan dan kondisi lingkungan masyarakat. Berikut disajikan data mengenai jumlah penerima PKH yang ada di Kecamatan Karanglewas Tahun 2022.

Tabel. 3 Jumlah penerima PKH di Kecamatan Karanglewas Tahun 2022

No.	Desa	Jumlah Penerima KPM
1.	Babakan	517
2.	Jipang	349
3.	Karanggude	306
4.	Karangkemiri	366
5.	Karanglewas Kidul	185
6.	Kediri	368
7.	Pagebatan	402
8.	Pasir Kulon	233
9.	Pasir Lor	234
10.	Pasir Wetan	235
11.	Singasari	393
12.	Sunyalangu	466
13.	Tamansari	542

Sumber data: SP2d PKH, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, bahwa jumlah penerima PKH di Kecamatan Karanglewas pada tahun 2022 sebesar 4.054 KPM, Kecamatan Karanglewas menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas yang termasuk dalam golongan penerima bantuan PKH. KPM PKH terbanyak adalah dari Desa Tamansari yang mencapai 542 KPM PKH. Melalui peningkatan jumlah KPM PKH yang terjadi di Desa Tamansari menjadi titik dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai adanya program PKH di desa tersebut. Melihat hal tersebut penelitian ini mencoba menganalisis dan mengimplementasi mengenai pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2022 di Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas agar dapat tercapai secara optimal

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik menjadi salah satu Pemahaman terhadap suatu topik atau permasalahan yang memerlukan banyak proses tahapan seperti *agenda setting*, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi dan terminasi dan keterlibatan dengan berbagai pihak secara integritas mengenai kebijakan publik (Lane1, et. Al. 2017). Kebijakan publik menjadi rujukan pelaksanaan program merujuk berbagai aktor seperti lembaga pemerintah untuk menindaklanjuti suatu tindakan atas permasalahan atau urusan kepentingan untuk memfasilitasi masyarakat umum (Anderson, 2017). Implementasi kebijakan merupakan proses yang dinamis yang masuk dalam struktur pemerintahan dan sistem administrasi dengan pedoman aturan secara legal (Asna Aneta. 2016). Dimana salah satu dari rangkaian kebijakan publik adalah melaksanakan program-program yang telah disepakati untuk bisa dilaksanakan (Kalimba, Edmond, Jaya Sukhla & Mbabazi Mbabazize. 2019). Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang keberlanjutan dari segala tindakan pemerintah yang bersumber dari eksekutif, legislatif, maupun lembaga peradilan untuk memberikan arahan dari tujuan yang ingin dicapai (Philip, Dahida dan Deewua. 2019).

Subjek dari program yang akan dilaksanakan bersifat penting dan memiliki peran umum yang dilaksanakan melalui berbagai aturan dan prosedur administrasi terkait dengan pelaksanaannya (Arizzo, 2019). Implementasi menjadi model upaya untuk menciptakan suatu kebijakan yang diharapkan melalui pendekatan prosedural dalam organisasi (Savard, 2019). Terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi alasan dari keberhasilan suatu implementasi kebijakan public, diantaranya yaitu: *viability*, *theoretical integrity*, *scope*, *capacity*, dan *unintended consequences* (Leaung, et al. 2019). Berdasarkan berbagai kajian literature yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat 6 (enam) variable pokok yang dianggap dapat memberikan sumbangsih atas keberhasilan dan kegagalan dari implementasi kebijakan. Ke-enam variable

tersebut diantaranya, Tujuan dan sasaran kebijakan yang rinci dan konsisten, Dukungan teoritis yang kuat dalam merumuskan kebijakan, Proses implementasi dilakukan dengan dasar hukum yang jelas, demi terjaminnya kepatuhan dari para pelaksana tugas implementasi kepada para kelompok sasaran, Komitmen dan kompetensi dari para pelaksana kebijakan, Dukungan dari para pemangku kepentingan dan Kestabilan atas kondisi sosial, ekonomi dan politik (Sabatier, 2017).

Pendapat Smith (1973) mengenai proses pelaksanaan kebijakan harus memperhatikan empat aspek:

1. Kebijakan yang Diidealkan: Aspek kebijakan yang diidealkan merujuk pada upaya memperhatikan sasaran kebijakan agar sesuai dengan tujuan kebijakan yang diharapkan.
2. Organisasi Pelaksana kebijakan: Aspek organisasi pelaksana kebijakan memiliki tujuan agar kebijakan dikelola dengan baik oleh para implementator, dalam hal ini birokrasi pemerintahan.
3. Lingkungan Kebijakan: Aspek lingkungan kebijakan bisa dilihat dari lingkungan sosial, lingkungan geografis dan lingkungan budaya yang berpengaruh langsung terhadap kebijakan yang sedang dilaksanakan.

Kebijakan publik merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dijalankan oleh para pemangku kepentingan demi permasalahan yang secara umum dapat menimbulkan dampak dan secara cepat diselesaikan dengan maksimal (Anderson, 2017). Pergerakan yang dinamis menjadi salah satu langkah pemerintah dalam Implementasi kebijakan sesuai dengan kaidah dan norma administrasi pemerintah yang telah ditetapkan. Keseluruhan tahapan dalam kebijakan merencanakan bersama dan disepakati secara bersama dan mencapai kepentingan secara bersama. Tahap ini disebut sebagai tahap implementasi kebijakan (Babatunde, Binoyo. 2019). Implementasi kebijakan merupakan keberlanjutan dari tindakan pemerintah yang bersumber dari eksekutif, legislatif, maupun lembaga peradilan untuk memberikan arahan dari tujuan yang ingin dicapai. Subjek dari program yang akan dilaksanakan bersifat penting, dan memiliki peran umum yang dilaksanakan melalui aturan dan prosedur administrasi terkait dengan pelaksanaannya (Madani Muhlis. 2017). Implementasi merupakan upaya mencakup aspek yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kebijakan publik (Savard. 2019).

Program Keluarga Harapan (PKH)

Kebijakan program keluarga harapan adalah program yang dilakukan oleh pemerintah di sektor sosial dalam masyarakat untuk menentaskan masalah kemiskinan secara bertahap. Berbagai kebijakan dan program mengenai masalah kemiskinan telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah namun semuanya belum membuahkan hasil ataupun dampak perubahan terhadap masalah kemiskinan yang terjadi di masyarakat (Philip, Dahida Deewua. 2018). Perkembangan Kemiskinan yang secara terus menerus menjadi fenomena yang terjadi di Indonesia seiring dengan kehidupan yang sangat kompleks (Routhe Aaron S. et al. 2016) (Routhe Aaron S. et al. 2016). Dampak dari masalah Kemiskinan tidak bisa dihindarkan yang berimbas pada berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan sampai dengan kebutuhan hidup yang secara umum belum bisa dirasakannya (Kalimba. 2019). Secara umum kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu ketidaksetaraan antara kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dengan kemilikan yang ada seperti halnya pada aset, penghasilan, pengetahuan dan keterampilan serta informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (Leaung, et al. 2019). Dengan demikian pemerintah selaku pemegang kekuasaan dan berhak untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya jaminan hidup masyarakat yang tergolong miskin berupa perlindungan sosial yang secara tidak langsung dapat mengancam kemajuan negara dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera akan ekonomi secara mandiri.

Sistem bantuan sosial merupakan skema bantuan yang ditujukan kepada individu ataupun kelompok yang memiliki standart kehidupan dibawah rata-rata yang melingkupi penghasilan dan kebutuhan untuk tujuan menyediakan dan menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya kepada masyarakat yang berhak menerimanya (Normaliza, A.M & Kamarulazizi Ibrahim. 2020). Skema bantuan sosial dapat difokuskan kepada sasaran target kelompok seperti masyarakat miskin yang berkeluarga sampai masyarakat yang sudah lanjut usia dengan penghasilan rendah. Program bantuan sosial ini secara umum memiliki tujuan umum kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pengentasan kemiskinan dengan berbagai program pemerintah. Bantuan sosial yang diberikan dalam program bansos tidak tergantung kepada kontribusi dari penerima manfaatnya. Bantuan sosial dapat diberikan secara langsung dalam bentuk uang (In-Cash Transfers), dan juga dalam bentuk barang dan pelayanan (In-Kind Transfers). Bantuan sosial sifatnya tertuju untuk penduduk yang mempunyai kerentanan dalam kemiskinan (Normaliza, A.M & Kamarulazizi Ibrahim. 2020).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk kebijakan publik yang dibuat secara khusus oleh pemerintah untuk mengentaskan dan mengurangi angka kemiskinan yang terjadi dimasyarakat umum. Kebijakan ini yang bersifat nasional menjadi perhatian utama bagi setiap keluarga seiring dengan perkembangan masalah kemiskinan yang sulit terhentikan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam lingkup keluarga secara bersyarat dan telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat dari program keluarga harapan. Program Keluarga Harapan merupakan program yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sejak tahun 2007 sebagai upaya pengembangan sistem perlindungan sosial (Kemensos, 2020). Regulasi dan pertauran mengenai implementasi kebijakan pada PKH merupakan bentuk tugas pemerintah dalam mengelola dan mengatur sistem jaminan sosial strategi intervensi pengentasan kemiskinan di Indonesia dengan mengadopsi Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfers) yang sudah banyak diterapkan berbagai negara. Landasan hukum PKH adalah Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif secara interaktif (B. Miles et al., 2014) yang tertuju pada proses bentuk implementasi yang dalam hal ini pelaksanaan kebijakan pada program keluarga harapan di Desa Tamansari, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas (B. Miles et al., 2014). Dalam pengumpulan data melalui beberapa proses dalam penelitian seperti wawancara, observasi dan dokumentasi (Morgan, 2017). Teknik Pemilihan informan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *purpose samplin* (Hektner et al., 2012: Nathan & Scobell, 2012). Dalam menganalisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis interaktif (B. Miles et al., 2014) yang mempunyai tujuan untuk melakukan analisa dari penelitian yang dilakukan pertama dan bentuk desain ekplanatori untuk menganalisis dalam penelitian kedua yang dilakukan (Cresswell&cresswell. 2018a). Target sasaran dalam penelitian yang dilakukan tertuju pada berbagai pihak pemerintah dan pihak swasta yang terdiri Unsur Pemerintah Desa Tamansari, Koordinator PKH Kecamatan Karanglewas, Pendamping PKH Desa Tamansari dan masyarakat penerima bantuan PKH. Pemilihan informan dilakukan dengan melalui teknik *purpose sampling* sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai (Cresswell&cresswell. 2018a). Dalam memvaliditasi data penelitian ini menggunakan triangulasi data sumber dan dokumen (Cresswell&cresswell. 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan implementasi kebijakan pada Program Keluarga Harapan di Desa Tamansari Kecamatan karanglewas Kabupaten Banyumas sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program keluarga harapan berfokus pada peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga, pendidikan dan kesehatan agar masyarakat secara bertahap berdaya secara ekonomi. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2022 yang dilakukan di Desa Tamansari Kecamatan karanglewas Kabupaten Banyumas, yang didalami melalui berbagai aspek seperti *idealized policy*, *target groups*, *implementing organization*, *Environmental factors*. Dengan program PKH yang dijalankan secara umum pelaksanaan yang dilakukan oleh koordinator ataupun pendamping PKH sesuai dengan tujuan pemerintah yaitu membantu meringankan mengelola beban pengeluaran bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) dimasyarakat, mampu meningkatkan taraf pendidikan dasar dan peningkatan di bidang kesehatan. Dengan hal tersebut program PKH menjadi salah satu program jaminan kehehidupan dalam pembangunan bidang ekonomi, pendidikan ataupun yang dapat tercapai dampak positif dimasyarakat. Melihat kondisi yang ada Kebutuhan KPM di Desa Tamansari secara umum di bidang pendidikan taraf sekolah masih terbilang kurang. Hal ini terjadi karena KPM menyekolahkan anaknya disekolah swasta yang mengharuskan membayar iuran setiap bulannya, artinya adanya perbedaan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap keluarganya. Sedangkan dalam bidang kesehatan masyarakat mampu menjangkau secara gratis sesuai dengan fasilitas kesehatan yang sudah ditentukan.

Respon penerima bantuan terhadap program yaitu menerima kehadiran program PKH dan mereka merasa senang karena dapat terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam hal penyaluran bantuan masih mengalami kendala yaitu pada saat penyaluran dana bantuan dari pusat kadang belum sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, akan tetapi secara keseluruhan proses penyaluran dana bantuan PKH di Desa Tamansari sudah berjalan. Berdasarkan hasil pengumpulan data serta analisis peneliti dan wawancara secara mendalam terkait komitmen dan perubahan pola pikir peserta PKH di Desa Tamansari dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan komitmen dan pola pikir peserta PKH harus didukung dengan sikap produktif secara sosial dan ekonomi.

Idealized policy

Idealized policy merupakan pendekatan yang berupaya membangun suatu kesamaan dari kebijakan yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Padahal dalam suatu organisasi, efektivitas komunikasi dari seorang pemimpin berpengaruh langsung terhadap kinerja pendamping atau kelompok serta unsur lembaga di bawahnya (Nwagboso, Chris. 2019). Pada aspek kebijakan yang ideal atau yang diharapkan memiliki fungsi utama yaitu penyesuaian terhadap kebijakan dengan tujuan dan landasan hasil yang akan dicapai. Seperti halnya implementasi kebijakan dalam Program Keluarga Harapan di Desa Tamansari sebagai taret kebijakan yang muncul dengan adanya salah satu program pemerintah dalam bidang sosial yang diperuntukan kepada masyarakat dengan harapan diimplementasi sesuai dengan aturan dan teknis yang ada. Dalam proses implementasi kebijakan mengenai Program Keluarga Harapan di Desa Tamansari memiliki rujukan aturan yang ditetapkan sebelumnya diantaranya:

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
2. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang pemberian hibah dan bantuan sosial
3. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang pembangunan jangka panjang dan menengah Tahun 2020-2025.

Kebijakan yang ideal dalam Implementasi Kebijakan mengenai Program Keluarga Harapan akan memiliki dampak secara langsung terhadap model dan desain kelembagaan pemerintah. Desain kelembagaan pemerintah menjadi faktor penentu dalam implementasi kebijakan mengenai Program Keluarga Harapan di masyarakat. Desain kelembagaan ini berupaya untuk menentukan sejauh mana keterbukaan lembaga atas berbagai rencana strategi yang akan dilakukan dalam implementasi kebijakan dalam Program Keluarga Harapan dimasyarakat. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa desain kelembagaan dalam proses implementasi

kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas dapat dikatakan cukup jelas dan terbuka. Dengan aturan ataupun regulasi yang dikeluarkan memberikan kemudahan dalam menunjang pelaksanaan program Keluarga Harapan kepada masyarakat lingkup pedesaan dengan prioritas mencapai suatu tujuan secara bersama. Hal ini dengan adanya peraturan menteri dan peraturan daerah yang terkoordinasi dengan berbagai lintas sektor menggambarkan desain kelembagaan pemerintah membuat jalur kordinasi secara sistematis dari mulai level pemerintah daerah kecamatan desa dan kelurahan di Kabupaten Banyumas secara terstruktur dengan baik. Sistem koordinasi yang kompleks memberikan pergerakan yang cepat terhadap rencana ataupun strategi dalam mengimplementasikan suatu program salah satunya program keluarga harapan di Desa Tamansari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

Target groups

Dalam studi implementasi kebijakan publik tentunya tidak bisa dilepaskan dari aspek *target group* (kelompok sasaran) yang dapat mendorong upaya keberhasilan kebijakan. Kelompok sasaran adalah mereka yang menjadi subjek kebijakan yang kemudian mendapatkan manfaat dari kebijakan yang dilaksanakan baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kompetensi merupakan salah satu faktor penentu dari keberhasilan atas suatu implementasi kebijakan. Kompetensi dimaknai sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menyelesaikan tugasnya dengan benar dan memiliki kelebihan yang didasarkan atas berbagai hal yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan sikap (Emron *et al*, 2019). Dalam kontek implementasi kelompok sasaran bukan hanya sekedar subjek tetapi menjadi pihak yang juga mampu mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Salah satu unsur *core value* dalam implementasi kebijakan terkait dengan pemahaman kondisi kelompok sasaran menjadi syarat dan ketentuan yang harus dijalankan, pernyataan tersebut bermakna bahwa kelompok sasaran semakin tinggi dalam ikut serta dalam partisipasi secara aktif dalam proses implementasi kebijakan.

Dalam proses implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan memiliki sebuah pedoman yang dijadikan sebagai sebuah regulasi dalam menjalankan suatu program yang ditujukan kepada para implementator kebijakan program seperti dalam hal ini koordinator dan Pendamping PKH yang secara langsung terlibat dari suatu kelembagaan pemerintah maupun masyarakat dan pihak swasta. Pihak-pihak tersebut tentunya memiliki suatu tujuan dan kepentingan yang hendak dicapai dalam melaksanakan kebijakan dalam program Keluarga Harapan di masyarakat. Dari hasil penelitian ini juga keterlibatan dari para pihak seperti pemerintah, koordinator ataupun pendamping PKH dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan di Desa Tamansari yang sebagian besar didesa tersebut masyarakatnya menjadi kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan mengenai Program Keluarga Harapan adalah masyarakat yang berada dalam kondisi dan situasi golongan miskin yang tidak memiliki penghasilan tinggi dan masuk dalam kategori dalam penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan.

Dengan adanya implmentasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyumas yang tertuju di Desa Tamansari pihak pemerintah selalu berupaya untuk menjalankan rencan-rencana ataupun strategi secara teknis dalam menanggulangi kemiskinan dimasyarakat secara berkelanjutan. Perkembangan masalah kemiskinan di sektor sosial diawali dengan adanya perubahan kondisi maupun situasi yan dialami masyarakat dalam memenuhi kebutuhan seiring dengan pendapatan penghasilan yang jauh dari rata-rata. Dengan hal tersebut, diperlukan langkah maupun strategi yang dapat membentuk pemetaan suatu wilayah mengenai penyebab terjadinya kemiskinan yang terus menerus berkembang dimasyarakat secara komperhensif, beberapa hal yang dapat dilakukan dalam melakukan pemetaan ini yaitu dengan mengumpulkan data masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan praktisi sosial.

Implementing organization

Model organisasi yang melaksanakan kebijakan harus mampu mengembangkan pendekatan yang relevan dan bisa dipahami oleh setiap kelompok sasaran, hal ini bertujuan agar tingkat keberhasilan kebijakan mampu dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak baik pelaksana maupun penerima program. Dalam konteks implementasi kebijakan peran organisasi pelaksana sangat penting yang mana harus mampu menerjemahkan kebijakan secara detail dan mengeksplorasi berbagai macam alternative untuk mencapai kepentingan publik. Dalam perspektif kebijakan, bahwa pihak atau yang juga bisa disebut dengan aktor berasal dari berbagai lembaga yang tercakup dalam supra struktur politik dan infrastruktur politik. Hal ini, tentunya tidak bisa dilepaskan dari masalah kebijakan. Dalam arah kebijakan menunjukkan arah interaksi kekuasaan yang menentukan suatu pilihan untuk ditentukan. Artinya kebijakan mengarah pada serangkaian tindakan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu yang dibuat oleh aktor yang berpengaruh atau berkuasa dalam kebijakan yang bersifat otoritatif. Sehingga, dapat dipahami hubungan antara kedua makna tersebut bersumber pada konsep kekuasaan *power* dan *policy* merupakan hasil dari interaksi kekuasaan antar *stakeholders*.

Mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyumas tentunya tidak bisa terlepas dari berbagai pihak yang terlibat. Hal tersebut selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Robbins dan Judge (2017), bahwa keterlibatan kerja dimaknai sebagai suatu kondisi dimana tingkat seseorang menyatukan dirinya ke dalam suatu pekerjaan dan secara aktif turut berkontribusi dalam implmentasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Banyumas seperti pemerintah kabupaten ataupun desa, dinas sosial maupun lembaga swasta lain yang tergabung dalam kerjasama pelaksanaan program keluarga harapan.

Environmental factors

Aspek lingkungan menjadi salah satu pengaruh sebagai penentu dari sebuah kebijakan terhadap suatu program yang akan dilaksanakan, hal ini diperlukan karena suatu organisasi dalam melaksanakan kebijakan didukung dengan adanya aspek lingkungan secara penuh untuk mencapai keberhasilan kebijakan program. Dengan dasar faktor lingkungan ini Desa Tamansari memfokuskan kepada pemangku kepentingan seperti pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan program untuk menjadi acuan dalam menjalankan aturan regulasi dan strategi supaya pengentasan kemiskinan melalui program keluarga harapan dapat tercapai dengan maksimal dan masyarakat dapat merasakan dampak dari adanya program keluarga harapan yang dijalankannya. Adanya program bantuan ini memberikan kemudahan untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat secara luas yang tidak hanya berfokus pada sektor sosial namun juga memberikan peningkatan pemahaman sektor ekonomi melalui edukasi dan sosialisasi peningkatan kesejahteraan keluarga secara mandiri dalam mencukupi kebutuhan hidup. Tidak hanya itu peningkatan pengembangan pendidikan juga tidak dapat dilepaskan seiring dengan bantuan yang diterima juga diperuntukan sektor pendidikan bagi anak yang harapannya dapat mencapai pendidikan setinggi tingginta atau dapat menjalankan kewajiban menempuh pendidikan 12 tahun sesuai dengan anjuran pemerintah.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, dari aspek *Idealized policy* dimaksudkan untuk melakukan gerakan-gerakan yang mampu menyelesaikan masalah kemiskinan disektor publik secara komperhensif melalui aturan, prosedur ataupun regulasi yang telah ditetapkan mulai dari peraturan nasional sampai dengan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan dalam program keluarga harapan dilingkungan masyarakat. Secara umum baik pemerintah maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya berupaya untuk meminimalisir perkembangan kemiskinan melalui fasilitasi program dan keterbukaan akses informasi dalam upaya menemukan solusi-dan strategi yang dapat diterapkan di seluruh daerah pedesaan salah satunya di Desa Tamansari. Aspek *Target group* dalam implementasi kebijakan secara bertahap mulai membangun dan membentuk kesadaran dengan bantuan koordinator

Program dan pendampingan kelompok kerja serta kelompok masyarakat penerima manfaat. *Implementing organization*, yaitu pihak-pihak yang tergabung dalam implementasi kebijakan program keluarga harapan baik dari unsur pemerintah daerah, kelompok masyarakat dan pihak swasta dapat terjalin komunikasi dan sinergisitas agar implemntasi dari kebijakan program keluarga harapan dapat berjalan sesuai aturan dan prosedurnya. *Environmental factors* pemahaman terhadap lingkungan sosial dan kondisi ekonomi masyarakat menjadi factor penentu dalam implmentasi program keluarga harapan. Pemerintah bukan hanya berfokus pada pelaksanaan program keluarga harapan dari sisi sosial dan ekonomi tetapi juga upaya dalam peningkatan pendidikan bagi anak di masyarakat, yang nantinya memungkinkan memiliki harapan dapat mengubah perekonomian keluarga secara bertahap.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Cv Alfabeta: Bandung.
- Andersson Annika Lantz et.al. 2015. What's the problem? Meaning making and learning to do mathematical word problems in the context of digital tools Annika. Published online: 25 January 2008. Department of Education, LinCS, Goteborg University,300, 405 30 Goteborg, Sweden.
- Arizzo. 2017. Public Policy Implementation, Research Project: Literature Review. Tennessee State University Department of Public Administration.
- Asna Aneta. 2016. Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. Universitas Negeri Gorontalo.
- Babatunde, Binoyo. (2019). "Effect of Poverty Reduction Programmes on Economics Development Evidence from Nigeria." *Arabian Journal of Bussines Nad Management Review (OMAN Chapter)*, Vol 4, No 1, Pp 26 -37
- B.Miles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2019. *Qualitative Data Analysis* - Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldaña - Google Books. In Sage Publications.
- Creswell, & Creswell. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* - John W. Creswell, J. David Creswell - Google Books. In SAGE Publications, Inc.
- Kalimba, Edmond, Jaya Sukhla & Mbabazi Mbabazize. 2019. Effect of Credit Management System on Financial Performance of Development Bank in Rwanda: Case Study of Development Bank of Rwanda, "The International Journal Of Business & Management", Vol 4 No 4
- Kusumanegara Solahuddin. 2010. *Model dan aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Gava Media: Yogyakarta.
- Kwong, Yan Wai. 2019. A Review of the Impacts of Agenda-sett. *Journal of Communication and Education*, 2(2). Communication Research Centre, Department of Journalism and Communication, Hong Kong Shue Yan University, Hong Kong
- Lane1, Jan Erik and Wallis, Joe. 2017. Non-profit organizations in public policy implementation. *Journal of public administration and policy research* Vol. 1(7) pp. 141-149. University of Freiburg, 79098 Freiburg im Breisgau, Germany.
- Leaung, et al. 2019. "Support for Policies to Improve the Nutritional Impact of the Supplemental Nutrition Assistance Program in California". *American Journal of Public Health*, Vol 105, No.8
- Madani Muhlis. 2017. *Dimensi Interkasi Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Morgan, D. L. 2017. Integrating Qualitative and Quantitative Methods: A Pragmatic Approach. In *Integrating Qualitative and Quantitative Methods: A Pragmatic Approach*. <https://doi.org/10.4135/9781544304533>
- Nathan, A. J., & Scobell, A. 2019. Experience sampling method : Measuring the quality of everyday life. In *Foreign Affairs* (Vol. 91, Issue 5).
- Normaliza, A.M & Kamarulazizi Ibrahim. 2020. "Poverty Reduction for Sustainable Development: Malaysia's Evidence-Based Solutions". *Global Journal of Social Sciences Studies*, Vol. 3, No. 1, Pp 29 – 42.

- Philip, Dahida Deewua. 2018. Public Policy Making and Implementation in Nigeria: Connecting the Nexus. Public Policy and Administration Research. Vol.3, No.6. Department of Public Administration, University of Abuja,P.M.B 117 Abuja-Nigeria.
- Routhe Aaron S. et al. 2016. Using Theory to Understand Public Support for Collective Actions that Impact the Environment: Alleviating Water Supply Problems in a Nonarid Biome. Social Science Quarterly, Volume 86, Number 4, December 2005.
- Savard, Francois Jean. With the collaboration of R. Banville. (2017). "Policy Cycles," in L. Cote and J.-F. Savard (eds.), Encyclopedic Dictionary of Public Administration.
- Stewart Jenny. 2018. Public policy as information. School of Business, University of New South, Wales, Canberra, Australia, 2013. Vol.31, No. 1. Sumber,<http://dx.doi.org/10.1080/08109028.2013.763630>.
- Theoria Stiftelsen. 2017. Philosophy and Public Policy. Published by Blackwell Publishing, 9600 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ, UK, and 350 Main Street, Malden, MA 02148, USA.
- Umar, Zulkarnain. 2018. Model Implementasi Kebijakan serta Strategi Terhadap Pendekatan Kebijakan Publik. Jurnal baca Vol VIII, No IV. Program Studi Ilmu Administrasi. Universitas Islam Makasar. Hal 282.
- Sahi, Nirmala Afrinti, Taufiqurokhman, And Andriansyah. 2019. "Policy Implementation of The Family Hope Program in Empowering the Poor In Bone Bolango District." (January). Doi: 10.4108/Eai.1-4-2019.2287277